



siaran pers

2 Agustus 2014

Proyek Pengembangan Tangguh LNG peroleh persetujuan AMDAL dan Izin Lingkungan

BP hari ini mengumumkan bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup telah menyetujui AMDAL Terpadu Proyek Pengembangan Tangguh LNG dan telah menerbitkan Izin Lingkungan (IL). AMDAL termasuk komitmen-komitmen lingkungan dan sosial Tangguh. Dan juga memuat peran dari pemerintah daerah dan pusat. Persetujuan ini merupakan syarat agar kegiatan proyek di lokasi Tangguh dapat dimulai.

"Ini merupakan pencapaian yang sangat penting bagi Proyek Pengembangan Tangguh LNG, dan saya ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Lingkungan Hidup, beserta Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dan Pemerintah Kabupaten Fakfak atas daya upaya dan kerjasamanya dalam mencapai keberhasilan ini. Kami berharap dapat segera menerima persetujuan penting lainnya sehingga kami dapat melaksanakan proyek yang akan memberi manfaat besar bagi Indonesia ini," kata Christina Verchere, BP Regional President Asia Pacific.

LNG Tangguh di Teluk Bintuni, provinsi Papua Barat, merupakan fasilitas gas alam cair (LNG) terbesar ketiga di Indonesia dan merupakan kegiatan operasi LNG pertama di Indonesia yang memadukan kegiatan hulu dan hilir. Kegiatan operasional yang sudah ada terdiri dari dua kilang pemrosesan LNG (Train 1 dan 2) dengan kapasitas produksi 7,6 juta ton per tahun (mtpa). Rencana pengembangan dengan penambahan kilang LNG ketiga (Train 3) pada kegiatan operasional yang sudah ada akan meningkatkan total kapasitas produksi menjadi 11,4 mtpa.

Proyek pengembangan US\$12 milyar ini akan memberi nilai tambah yang cukup besar bagi pemerintah Indonesia dan akan membantu memenuhi kebutuhan energi di Indonesia. Sebagai bagian dari proyek pengembangan Tangguh, BP dan mitra-mitranya akan memasok 40 persen dari output Train 3 (1,5 mtpa) kepada PT. PLN (Persero) untuk pasar domestik Indonesia.

Beberapa persetujuan penting lain, yang kini masih dalam proses, dibutuhkan agar proyek pengembangan ini dapat meneruskan perencanaan, desain dan pengadaan barang dan jasa.

"Kami terus berkoordinasi erat dengan SKK Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta lembaga pemerintah lain untuk memperoleh persetujuan penting tersebut. Kami tetap berharap bahwa persetujuan-persetujuan itu dapat kami peroleh dengan segera," kata Christina.

Catatan untuk redaksi:

- Tangguh dioperasikan oleh BP Berau Ltd sebagai kontraktor SKK Migas. BP memegang 37,16% saham di proyek tersebut. Mitra-mitra kontrak Tangguh lainnya adalah MI Berau B.V. (16,30%), CNOOC Muturi Ltd. (13,90%), Nippon Oil Exploration (Berau), Ltd. (12,23%), KG Berau/KG Wiriagar (10,00%), Indonesia Natural Gas Resources Muturi Inc. (7,35%), dan Talisman Wiriagar Overseas Ltd. (3,06%).
- BP telah lebih dari 45 tahun bekerja di Indonesia dan merupakan salah satu investor asing terbesar. Kegiatannya didominasi oleh bisnis eksplorasi dan produksi, khususnya LNG Tangguh di Provinsi Papua Barat yang mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2009.
- BP menerima pemberitahuan persetujuan tersebut melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02.37.07 Tahun 2014 tertanggal 24 Juli 2014.